

POLISI: MITOS DAN VISI Suatu Catatan Awal

Oleh: Ade M. Kartawinata

Kepolisian Republik Indonesia atau dikenal akrab oleh masyarakat luas sebagai Polisi, dari waktu ke waktu yang ukuran tugasnya, dewasa ini, bukan lagi hari ke hari tetapi menit ke menit yang selalu dihadapkan pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang kompleks. Masalah yang dihadapi polisi tidak dapat diabaikan sebagai akibat langsung dari perkembangan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat yang begitu cepat tanpa diikuti oleh seperangkat institusi sosial dalam masyarakat yang mendukung perubahan tersebut.

Dalam kondisi serupa itu, satu-satu institusi sosial yang diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk menentramkan dan mengendalikan ekses perubahan sosial dan budaya yang cepat dan seolah-olah tanpa kendali itu adalah polisi. Karena polisi, sesuai dengan salah satu bidang tugasnya, ialah melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Binkamtibmas). Ini artinya, menuntut kemampuan polisi untuk membimbing dan membina masyarakat ke arah kehidupan yang terjamin ketenteramannya.

Tentunya untuk dapat menjamin terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat itu polisi menjadi inti kekuatan penegak hukum, di samping kekuatan kamtibmas (Periksa GBHN, 1993). Dengan demikian, agar peran dan fungsi polisi sebagai penegak hukum, membina ketenteraman masyarakat, memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan lingkungan yang aman dan tertib dalam kerjanya menuntut polisi berorientasi sosial budaya.

Konsep orientasi sosial budaya polisi dalam Binkamtibmas, secara umum dipergunakan untuk menunjukkan keseluruhan daya-daya penata endogen (*endogenous regulatory forces*) yang mendasari perilaku masyarakat. Dalam pengertian ini, dimensi orientasi sosial budaya polisi merujuk pada kemampuan pemahaman kebudayaan untuk digunakan dalam menghadapi lingkungan sosial. Karena itu, dimensi orientasi sosial budaya dalam Binkamtibmas diwujudkan melalui upaya menangkal gangguan kamtibmas dari dalam diri masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan iptek dan arah kemajuan masyarakat itu sendiri.

Dalam hal ini, perkembangan iptek dan kemajuan masyarakat dilihat dengan penuh kearifan disertai pandangan menyeluruh dan mendalam terhadap masalah yang bakal dihadapi. Dengan sikap seperti itu, setidaknya polisi dapat mengantisipasi manakala kemajuan masyarakat atau teknologi menjadi *self-legitimate*. Sebab, jika kemajuan atau teknologi menjadi *self legitimate*, maka implikasinya akan sangat jauh, yaitu politik akan berubah menjadi teknik, nilai hanyalah se-kadar fungsi, masyarakat menjadi sistem, pikiran menjadi *input*, martabat identik dengan *output*, kebudayaan jadi rekayasa dan teknologi menjadi ideologi.

Akibat dari keadaan itu, tentunya dapat menimbulkan semakin melonggarnya berbagai norma dalam masyarakat. Pelonggaran norma tersebut pada akhirnya memperkuat provokasi tindak penyimpangan sosial.

Itulah makna dari pengertian sosial budaya dalam Binkamtibmas, sehingga polisi dalam tindak kerjanya meninjau dari sudut proses terjadinya perbuatan penyimpangan sosial tersebut. Proses sosial yang dijalani polisi dalam melakukan aktivitasnya dapat dianggap sebagai suatu tahap interaksi sosial di dalam kehidupannya. Beberapa teori sosial ada yang berasumsi bahwa aktivitas tersebut merupakan penyesuaian diri. Dan, interpretasi dari aktivitas yang dilakukan itu adalah aktivitas dalam rangka menunjang keteraturan sosial.

Keteraturan sosial akibat perkembangan iptek dan kemajuan masyarakat tercipta, karena polisi telah dapat membaca situasi melalui pengetahuannya tentang perkembangan sosial, budaya dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Artinya, pengetahuan polisi menuntut selangkah di atas pengetahuan masyarakatnya. Dengan demikian, polisi dapat menciptakan institusi keteraturan sosial yang berakar pada masyarakat, sebab keberadaannya memang dibutuhkan untuk menata kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Mitos polisi yang kurang tanggap, lesu bergerak, emosional, tidak bisa berdialog dan kurang profesional serta tidak kreatif dalam menjalankan tugas dengan sendirinya akan sirna oleh pemberian bekal pengetahuan yang selangkah di atas pengetahuan masyarakatnya. Ini artinya, pengetahuan terhadap perkembangan iptek dan perubahan sosial-budaya masyarakat betul-betul dikuasai sesuai jenjang dan tingkat kepangkatannya untuk digunakan

sebagai bahan antisipasi atas gerak sosial-budaya masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman polisi yang berada satu atau dua langkah di atas pengetahuan yang dimiliki masyarakat merupakan visi polisi pada masa-masa mendatang untuk melancarkan tugas melayani masyarakat dalam bidang Binkamtibmas.

Pemberian bekal pengetahuan yang selangkah di atas pengetahuan masyarakatnya itu, dapat diterapkan pada setiap jenjang pendidikan dan latihan di lembaga kependidikan kepolisian. Tentunya, pemberian pengetahuan serupa itu fungsional dengan beban tugas yang bakal dipikulnya dan selaras dengan masyarakat yang perlu dilayaninya serta kontekstual dalam waktu dan perkembangan iptek.

Dengan demikian, sosok polisi Tri Brata yang berpikiran jernih, rasional, kreatif dan mudah diajak dialog serta cekatan dalam melindungi dan menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat muncul ke permukaan, sekalipun dalam situasi yang kompleks dan sulit. Ini artinya, "Tri Brata" bukan hanya sekedar simbol tetapi berwujud sosok polisi Tri Brata yang muncul sepenuhnya dari perpaduan dinamika dan vitalitas menjadi bhayangkara sejati sebagai pengayom, pelindung dan pembimbing masyarakat dalam menghadapi dunia bebas.

Drs. Ade M. Kartawinata, M.Phil, adalah Peneliti Antropologi-Sosiologi Pusat Penelitian Kemasyarakatan & Kebudayaan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran